

Implementasi Hukum Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Long Melaham Provinsi Kalimantan Timur

Henita¹ Muhammad Adam HR²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

¹E-mail Mahasiswa : henitanuriansyah@gmail.com

²Email Dosen : muhammadadamhr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Hukum terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memberikan akses Kesehatan yang lebih merata kepada Masyarakat, Penelitian ini fokus pada penerapan kebijakan BPJS Kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan di Daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait kebijakan serta regulasi BPJS Kesehatan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak Implementasi Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Long Melaham, Kalimantan Timur. Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional yang berfungsi sebagai alat Pemerintah untuk memberikan akses Pelayanan Kesehatan yang lebih merata kepada Masyarakat, Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan BPJS Kesehatan di Daerah. Metode metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan Pengumpulan data menggunakan digunakan dalam, observasi, dan analisis dokumen mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan analisis dokumen mengenai kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan. Studi menemukan bahwa, meskipun BPJS Kesehatan perlu memberikan layanan yang optimal, namun terdapat banyak tantangan dalam penerapannya di Long Melaham, seperti kurangnya Fasilitas dan tenaga medis, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan program.

Kata Kunci : Implementasi hukum, pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, Long Melaham, Kalimantan Timur.

1. Pendahuluan

Sektor Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mewajibkan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa terkecuali.

Long Melaham, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, meskipun memiliki potensi alam yang besar, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Seiring dengan implementasi program BPJS Kesehatan, masyarakat di daerah ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari pelayanan kesehatan yang terjangkau, baik melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes) maupun rumah sakit. Namun, implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di daerah ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang program jaminan kesehatan menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan BPJS Kesehatan diimplementasikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta dampak dari implementasi tersebut terhadap kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan jaminan kesehatan di daerah terpencil, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan melalui BPJS di masa yang akan datang.

2. Rumusan masalah

Bagaimana implementasi hukum terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Long Melaham. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana dampak dari implementasi BPJS Kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Long Melaham.

3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Long Melaham.

Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan BPJS Kesehatan di Daerah tersebut.

Untuk mengevaluasi dampak dari implementasi BPJS Kesehatan terhadap kualitas Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat Long Melaham.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi hukum dalam sektor kesehatan, khususnya terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah

daerah, dan fasilitas kesehatan setempat, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efektivitas implementasi program BPJS di daerah terpencil seperti Long Melaham. Batasan Masalah Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi hukum terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada aspek legalitas, kendala operasional, serta dampak terhadap kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini tidak membahas secara detail kebijakan nasional BPJS Kesehatan secara keseluruhan, tetapi lebih berfokus pada implementasi di tingkat lokal.

4. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Tujuan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara rinci bagaimana implementasi undang - undang tersebut terkait dengan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur, serta dari- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara rinci bagaimana implementasi undang - undang tersebut terkait dengan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur, serta faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut di tingkat lokal.

5. Tinjauan Pustaka

Penelitian Jenis Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi selama implementasi program BPJS Kesehatan di Long Melaham. Studi ini lebih berfokus pada pemahaman dan klarifikasi bagaimana organisasi terkait masyarakat umum di komunitas menerapkan dan menanggapi masalah terkait kesehatan.

Penelitian Lokasi Penelitian ini dilakukan di Long Melaham, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami implementasi BPJS Kesehatan di daerah terpencil dengan tantangan geografis dan sumber daya yang terbatas.

Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari petugas BPJS Kesehatan, tenaga medis di fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, dan rumah sakit), serta masyarakat penerima manfaat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait

pengalaman mereka dalam mengakses layanan kesehatan BPJS, kendala yang dihadapi, serta persepsi

mereka terhadap kebijakan jaminan kesehatan yang ada. Observasi Partisipatif: Peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan BPJS Kesehatan di Long Melaham. Observasi ini membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk masalah operasional, kapasitas fasilitas, dan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien. Studi Dokumentasi: Dokumentasi berupa laporan atau arsip terkait implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham juga dianalisis. Ini termasuk regulasi, kebijakan lokal, dan data terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang dapat memberikan konteks tambahan mengenai penerapan kebijakan tersebut. Teknik Analisis Data Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah berikut: Transkripsi dan Kategorisasi: Data hasil wawancara dan observasi akan ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan tujuan penelitian. Identifikasi Tema Utama: Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti masalah dalam implementasi, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap kualitas layanan kesehatan di Long Melaham. Interpretasi dan Analisis: Peneliti akan menganalisis data berdasarkan teori yang relevan dengan implementasi hukum dan pelayanan publik, serta menghubungkannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat yang memengaruhi pelaksanaan BPJS Kesehatan. Validasi Data : Untuk memastikan validitas data, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen yang ada, serta meminta konfirmasi dari informan kunci terkait interpretasi data yang diperoleh. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu:

Data Primer: Data utama diperoleh langsung dari wawancara dengan informan kunci (petugas BPJS, tenaga medis, dan peserta BPJS), observasi lapangan di fasilitas kesehatan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait BPJS Kesehatan.

Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan BPJS Kesehatan, laporan tahunan BPJS Kesehatan, serta studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Sampling Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel secara sengaja, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Informan yang dipilih adalah: Petugas BPJS Kesehatan yang terlibat langsung dalam implementasi program di Long Melaham. Tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan yang melayani peserta BPJS Kesehatan Masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan di Long Melaham. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar 3 bulan, dengan rincian waktu untuk persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Keterbatasan Penelitian Beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini

antara lain keterbatasan akses ke data lapangan karena faktor geografis, serta terbatasnya jumlah informan yang dapat diwawancarai karena sulitnya menghubungi beberapa peserta BPJS di daerah terpencil. Selain itu, peneliti juga menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan observasi yang lebih luas. Etika Penelitian Peneliti akan menjaga kerahasiaan dan privasi data yang diperoleh dari informan. Semua informan akan diberi penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian serta diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan secara sukarela sebelum wawancara dilakukan. Penelitian ini juga akan mematuhi standar etika penelitian yang berlaku, termasuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak manapun. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan.

6. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian terkait implementasi hukum terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Hasil dan pembahasan ini mencakup implementasi kebijakan BPJS Kesehatan, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham Implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham telah berjalan sejak program ini diperkenalkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat di daerah terpencil. Namun, implementasi program ini di Long Melaham menghadapi sejumlah tantangan yang berhubungan dengan aspek hukum, operasional, dan sumber daya. Kepatuhan terhadap Regulasi BPJS Kesehatan Dari hasil wawancara dengan petugas BPJS dan tenaga medis di Long Melaham, diketahui bahwa fasilitas kesehatan di daerah ini umumnya telah mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan, baik yang berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang mandiri, dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas kesehatan setempat juga telah terdaftar dan memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, meskipun secara umum telah ada kesesuaian dengan aturan yang ada, implementasi kebijakan BPJS di tingkat fasilitas kesehatan masih menunjukkan beberapa kekurangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan regulasi. Petugas di lapangan mengungkapkan bahwa masih ada beberapa tantangan terkait pemahaman yang belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS. Selain itu, sebagian besar fasilitas kesehatan juga masih bergantung pada sistem manual dalam

pendaftaran pasien, yang berisiko menyebabkan ketidaksesuaian data atau keterlambatan klaim. Akses Layanan Kesehatan Secara keseluruhan, implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang melayani pasien BPJS, seperti Puskesmas Long Melaham, dapat memberikan layanan kesehatan dasar, pemeriksaan, pengobatan, serta rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan. Namun, mengingat kondisi geografis dan transportasi yang sulit di wilayah ini, sebagian pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit harus menempuh perjalanan jauh, yang seringkali menjadi hambatan dalam pelayanan. Berdasarkan observasi lapangan, fasilitas kesehatan di Long Melaham cenderung terbatas dari segi jumlah dan kualitas sarana serta prasarana medis. Meskipun ada tenaga medis yang cukup terlatih, namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani, sehingga beberapa kali terjadi antrean panjang untuk mendapatkan layanan. Kendala dalam Implementasi BPJS Kesehatan Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program BPJS Kesehatan di Long Melaham, yang melibatkan berbagai aspek, baik internal fasilitas kesehatan maupun eksternal yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Keterbatasan Infrastruktur dan Tenaga Medis Salah satu kendala utama dalam implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas medis. Beberapa Puskesmas yang ada tidak memiliki peralatan medis yang lengkap, sehingga pasien BPJS yang membutuhkan penanganan lebih lanjut terpaksa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar yang berlokasi di daerah lain. Jarak yang jauh dan kondisi transportasi yang sulit menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga medis, seperti dokter umum dan spesialis, di Long Melaham juga menjadi kendala. Menurut informasi yang diperoleh dari tenaga medis setempat, banyak dokter yang harus menangani sejumlah besar pasien dalam waktu singkat, yang berisiko menurunkan kualitas pelayanan. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas Sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan masih menjadi tantangan besar di Long Melaham. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur pendaftaran, hak-hak peserta, serta jenis layanan yang bisa didapatkan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat membuat sebagian besar peserta BPJS tidak mengetahui cara mengajukan klaim atau memperbaiki data yang salah dalam sistem BPJS.

Hasil wawancara dengan beberapa peserta BPJS menunjukkan bahwa mereka terkadang menghadapi kebingungan terkait prosedur klaim atau penggantian biaya, yang berujung pada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Koordinasi Antar Pihak Koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program di Long Melaham. Meskipun BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan di daerah tersebut, beberapa petugas BPJS mengeluhkan kurangnya komunikasi yang efektif mengenai kebijakan terbaru atau prosedur klaim yang

sering berubah. Dampak Implementasi BPJS Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Secara umum, implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham memberikan dampak positif terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan kini lebih mudah mengakses pengobatan dan pemeriksaan medis. Namun, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas- fasilitas kesehatan di daerah ini masih jauh dari optimal, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya.

Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

BPJS Kesehatan memberikan manfaat dalam bentuk akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Long Melaham. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan yang tinggi. Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan yang diterapkan di Long Melaham juga memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan.

Tingkat Kepuasan Peserta

Meskipun terdapat peningkatan dalam akses layanan kesehatan, tingkat kepuasan peserta BPJS di Long Melaham masih perlu ditingkatkan. Beberapa peserta mengungkapkan ketidakpuasan terhadap panjangnya antrean di fasilitas kesehatan dan lambatnya proses klaim. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kendala administratif yang ada di fasilitas kesehatan setempat. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi BPJS Kesehatan Berdasarkan temuan di lapangan, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham: Peningkatan Infrastruktur Kesehatan: Diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Long Melaham, baik dalam hal peralatan medis maupun jumlah tenaga medis yang tersedia. Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan prosedur yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Peningkatan Koordinasi: Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah operasional yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Long Melaham dapat semakin meningkat dan sesuai dengan tujuan utama dari program BPJS Kesehatan.

7. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hukum terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham Secara umum, program BPJS Kesehatan di Long Melaham telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang terjamin. Fasilitas kesehatan di daerah ini, meskipun terbatas dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia, sudah melayani peserta BPJS dengan baik, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Kendala yang Dihadapi Beberapa kendala utama yang menghambat implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham antara lain adalah: Keterbatasan Infrastruktur Kesehatan: Fasilitas kesehatan di daerah ini masih terbatas, dengan keterbatasan tenaga medis dan alat kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat di Long Melaham yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan hak-hak mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang berdampak pada penggunaan layanan yang tidak optimal. Koordinasi yang Kurang Efektif: Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah menghambat kelancaran implementasi dan penyaluran layanan kesehatan bagi peserta BPJS.

Dampak Implementasi BPJS Kesehatan

Dampak positif dari implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Namun, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketepatan waktu, efisiensi pelayanan, dan pengelolaan klaim. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan kini dapat merasakan manfaat dari jaminan kesehatan, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam hal Pelayanan yang optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi BPJS Kesehatan di Long Melaham adalah sebagai berikut: Peningkatan Infrastruktur Kesehatan Untuk mendukung implementasi program BPJS Kesehatan yang lebih efektif, sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di Long Melaham. Pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan perlu bekerja sama dalam meningkatkan sarana dan prasarana medis, serta menambah jumlah tenaga medis

yang terlatih agar pelayanan kesehatan di daerah ini dapat lebih optimal. Selain itu, pembenahan sistem informasi kesehatan dan teknologi yang mendukung administrasi BPJS juga sangat diperlukan. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Masyarakat di Long Melaham perlu diberikan edukasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan prosedur BPJS Kesehatan, baik melalui media sosial, pelatihan langsung, maupun sosialisasi di tingkat desa atau kecamatan. Pemahaman yang baik tentang hak-hak peserta BPJS akan meningkatkan partisipasi mereka dalam program ini serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih maksimal. Peningkatan Koordinasi Antara BPJS, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah Untuk mengatasi kendala-kendala operasional, koordinasi yang lebih baik antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Rapat koordinasi yang rutin dan komunikasi yang lebih transparan akan memudahkan pengawasan dan evaluasi implementasi program di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terbaru dapat diterapkan secara efektif. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas kesehatan di Long Melaham perlu ditingkatkan dalam hal kualitas pelayanan. Selain itu, perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, tepat waktu, dan efisien. Hal ini juga termasuk peningkatan pelayanan administrasi terkait klaim BPJS, yang harus diproses dengan lebih cepat dan akurat. Pemantauan dan Evaluasi Berkala BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi program di Long Melaham. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang masih ada dan mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi juga akan memberikan dasar untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan lebih lanjut. Dengan implementasi yang lebih baik dan dukungan dari semua pihak terkait, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Long Melaham, serta mewujudkan tujuan utama dari sistem jaminan kesehatan nasional, yaitu akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Sukarno, R. (2014). *Manajemen Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan di Indonesia*. Salemba Medika.

Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Mardani, M. (2016). *Aspek Hukum*

dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
Pambudi, R. (2017). *Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Teori dan Praktik.* Andi Publisher.

JURNAL

- Fahmi, M., & Yuliana, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Terpencil : Studi Kasus di Kalimantan Timur.* Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 45-56.
- Hidayat, R., & Pratiwi, S. (2018). *Kendala Implementasi BPJS Kesehatan di Wilayah Perbatasan: Studi di Kalimantan Timur.* Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(3), 112-120.
- Lestari, D., & Setiawan, S. (2019). *Peran BPJS Kesehatan dalam Peningkatan Akses Layanan Kesehatan di Daerah Tertinggal.* Jurnal Administrasi Negara, 11(4), 223-233.
- Zulfa, H., & Darmawan, R. (2022). *Evaluasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Daerah Tertinggal: Kasus Long Melaham, Kalimantan Timur.* Jurnal Evaluasi Kebijakan, 9(3), 150-158.
- Mulyani, M. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Kalimantan Timur.* Jurnal Manajemen Kesehatan, 7(2), 77-